

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pernikahan sebagai salah satu institusi dalam masyarakat, secara harafiah dalam UU Perkawinan 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai kesepakatan yang mulia dengan basis perasaan, cita-cita ideal, dan agama. Dilihat dari sisi sosiologis, pernikahan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan wanita bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah (Kartasapoetra, 1997:76-78). Dalam masyarakat pernikahan memiliki makna yang berbeda beda, di awal abad 20 pernikahan merubah "from an institution to a companionship" (Burgess & Locke, 1945), dimana persahabatan, seks, dan melahirkan didefinisikan sebagai pusat dari pernikahan (Cherlin, 2004). Pernikahan juga dipandang sebagai tanda pendewasaan dan merepresentasikan individu masuk pada peran yang lebih dewasa (Forsyth, Johnson, 1995), pernikahan juga dinilai sebagai pencapaian dan mendefinisikan status pernikahan sebagai simbol publik dimana pasangan sudah memenuhi prasyarat untuk melaksanakan pernikahan (Cherlin, 2004). Semua hal yang telah disebutkan diatas mencerminkan pernikahan sebagai bagian dari proses kehidupan dan berkeluarga dimana beriringan pula dengan munculnya ekspektasi sosial untuk masuk dalam institusi tersebut.

Seiring berkembangnya zaman pandangan masyarakat mengenai pernikahan juga mulai mengalami pergeseran, dimana banyak pertimbangan-pertimbangan yang baru diperhitungkan muncul untuk memasuki institusi pernikahan terlepas dari faktor budaya dan nilai, serta ekspektasi sosial setempat. Pada institusi pernikahan ini wanita sangat perlu disoroti dalam praktiknya, terlihat pada cerminan berbagai budaya masyarakat yang secara langsung maupun tersirat tidak dapat memisahkan wanita dengan institusi pernikahan sendiri, misalnya saja di Jepang yang menganggap sebagai

cara wanita melayani negaranya (Muta 2006), didukung dengan pernyataan mantan perdana menteri Jepang (2003) mengenai pembiayaan sia sia yang dilakukan untuk wanita tidak menikah dan tidak memiliki anak dan hidup bebas dan egois dengan hanya mementingkan karir (Taipei Times 2003). Di Indonesia sendiri pernikahan dianggap menjadi sebuah institusi akhir yang akan ditempati manusia, dengan demikian secara umum kewajiban untuk menikah menurut masyarakat Indonesia masih tinggi. Jika kita melihat berbagai adat istiadat khususnya sangat relevan terhadap andil konstruksi pernikahan di masyarakat Indonesia karena kebanyakan dari mereka memiliki penilaian sendiri mengenai hal ini. Munculnya fenomena pernikahan dini khususnya di kalangan remaja perempuan menjadi salah satu contoh ekstrim andil adat istiadat dan budaya dalam konstruksi menikah yang dibentuk. Budaya mandar dan bugis sendiri pernikahan dini bukanlah hal yang baru. Kebiasaan ini sudah ada sejak lama karna berbagai alasan diantaranya perjodohan antara keluarga, kenakalan remaja yang menuntut mereka untuk segera menikah, penutup malu (pasampo siri dalam istilah bahasa bugis) sampai pada paham yang berbau mitos yakni tidak boleh menolak lamaran lebih dari tiga kali karna menurut orang tua jaman dulu anaknya akan susah mendapatkan jodoh lagi. Pada budaya tradisi lokal di Rembang, Jawa tengah terdapat budaya bahwa bila si gadis belum menikah dianggap tidak laku, sehingga orang tua lebih memilih anaknya menikah muda dari pada dikatakan tidak laku (Nazli Halawani P, 2017). Kemudian ada juga kepercayaan bahwa bila anak sudah dilamar tidak boleh ditolak karena bila ditolak akan menyebabkan anaknya tidak laku di kemudian hari. Kemudian pada wanita muslim jawa dimana mereka secara umum masih harus berhadapan dengan ekspektasi yang disematkan oleh masyarakat terhadap dirinya, salah satunya lewat pernikahan. Menguatnya ekspresi keagamaan masyarakat Muslim Jawa mendorong implementasi nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian peran gender dan relasi antar gender menurut ajaran Islam semakin ditekankan dalam masyarakat pada institusi pernikahan.

Pada sisi lain realitas seiring perkembangan zaman melajang dan menunda pernikahan menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh masyarakat dalam menjalani hidupnya,

baik hanya sementara melajang (menunda pernikahan) atau bahkan memiliki rencana untuk mempertahankan status lajangnya untuk selamanya (never married). Jika beberapa tahun kebelakang kita dapat melihat fenomena melajang ini banyak ditemukan pada masyarakat barat yang memiliki kultur lebih terbuka pada banyak pilihan selain melangsungkan dan mengikat status pada pernikahan, fenomena ini sekarang sudah banyak ditemukan khususnya di Asia. Di Jepang (1975), 50% pria dan 32% wanita usia 20-34 tahun tidak menikah. Pada tahun 2000, angka ini mengalami peningkatan ke 68% pria dan 56% wanita yang tidak menikah. (White Paper on the Policy on a Declining Birthrate 2004). Didukung Laporan national institute of Population and Social Security Research, diperkirakan diantara wanita yang kurang dari 16 tahun sekarang sudah mempunyai pikiran untuk tidak menikah. Di Indonesia sendiri pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik, di perkotaan khususnya DKI Jakarta terdapat 33,41 % proporsi wanita pada usia 15-49 tahun yang belum menikah. (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021).

Merujuk pada jurnal ilmiah dan artikel berita yang terbit antara tahun 2019-2020 pula fenomena melajang dan penundaan pernikahan di Asia meningkat dengan negara Taiwan sebagai negara yang paling banyak individu (pria dan wanita) yang menunda pernikahan kemudian diikuti oleh Korea Selatan, Jepang serta Myanmar. Fenomena melajang dan penundaan pernikahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena melihat perbedaan kultur yang ada pada masyarakat barat dan asia. Telah disebutkan sebelumnya masyarakat barat memiliki kultur yang lebih terbuka bahkan telah mengalami pergeseran makna pada institusi pernikahan itu sendiri, sementara pada masyarakat Asia yang kita ketahui menilai pernikahan sebagai salah satu capaian yang harus diraih individu dalam bermasyarakat serta pernikahan memiliki nilai kultur tinggi di masyarakat sendiri. Bagi orang-orang yang melajang atau menunda pernikahan sendiri dengan ekspektasi sosial yang telah disebutkan sebelumnya kemungkinan konsekuensi mendapat stigma dan stereotip tertentu di lingkungan masyarakat akan lebih tinggi, lebih spesifik dan terlihat pada lingkungan keluarga karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi sosial di masyarakat.

Penundaan pernikahan ini lebih banyak dilakukan oleh wanita dimana relevan pada zaman sekarang peran wanita dalam masyarakat sudah jauh lebih banyak dan memiliki kebebasan dibanding dengan zaman zaman sebelumnya. Pendidikan misalnya menjadi salah satu faktor utama perempuan melakukan penundaan pernikahan, perempuan pada zaman sekarang memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang lebih luas dibanding dengan dulu, hal ini kemudian meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, Berdasarkan data dari BPS RI, Susenas tahun 2009-2021, terlihat angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-18 tahun di daerah pedesaan maupun di perkotaan berdasarkan jenis kelamin, terlihat angka partisipasi sekolah lebih tinggi perempuan dari pada laki-laki. Setiap tahunnya mulai dari tahun 2009-2021 rata-rata lebih tinggi 2% APS perempuan daripada laki-laki. Sangat jelas terakhir di tahun 2021 menunjukkan bahwa APS perempuan umur 16-18 tahun sekitar 76,32% sedangkan laki-laki sekitar 75,90%. Setiap tahunnya dan setiap umurnya sangat terlihat APS perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Hal ini berlaku sama halnya seperti pada ranah pekerjaan dimana wanita khususnya generasi millennial memiliki partisipasi yang besar terhadap karir, bisnis dan hal hal lain yang mengacu pada kesuksesan dimana mereka lebih mencurahkan dirinya pada aktualisasi diri ditengah masyarakat.

Konsep wanita karir dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988), sebagai kata yang berasal dari bahasa belanda yang berarti pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Selain itu kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan). Menurut E. Sumaryono, wanita karier ialah sosok perempuan yang dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran serta dan keterlibatannya, dan mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. Ciri-ciri wanita karier lebih ditekankan pada hasil yang berupa imbalan keuangan, bekerja terikat kepada orang lain atau perusahaan dan kantor. Yang

terpenting dari hasil pekerjaannya adalah menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah suatu hari nanti. Dalam ranah karir yang dijalankannya banyak faktor yang andil dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai masuknya mereka pada institusi pernikahan mengingat capaian mereka di bidang tertentu tersebut. Jika membahas wanita karir tentu kita tidak bisa lepas pula pada bagaimana proses peraihan pecapaian mereka hingga sampai pada titik sekarang dimana kembali pada norma dan stereotip gender yang dihadapi di ranah pekerjaan.

Aktivitas wanita karir di perkotaan dimana sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup secara mandiri menambah alasan realitas pernikahan menjadi bukan prioritas di antara mereka. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan yang kian banyak, banyak dari mereka yang hidup di perkotaan seperti di Jakarta mempertimbangkan kembali institusi pernikahan sebagai hal yang menguntungkan bagi mereka atau tidak. Hal ini berkaitan pula dengan pergeseran makna pernikahan pada individu perkotaan. Berkaitan dengan penundaan pernikahan sendiri, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mereka memilih untuk menunda pernikahan karena menganggap kurang memerlukan pernikahan dalam kehidupannya, pernikahan dianggap menjadi penghalang dalam keberlanjutan karirnya (Jepang). Penelitian lain juga mengemukakan bahwa keputusan cuti karir bagi wanita karir karena berbagai faktor tertentu membuat mereka lebih sulit untuk masuk kembali pada dunia karirnya (Bian & Wang, 2019). Hal ini menjadi problematis karena bertentangan dengan ekspektasi sosial dalam budaya yang dianut masyarakat kebanyakan khususnya di Asia, berkaitan dengan keputusan keputusan yang diambil wanita khususnya yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh karena realitas sosial yang ada di masyarakat mengenai pernikahan dan kaitannya dengan tren penundaan pernikahan yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan relevansi realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di perkotaan. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti karena peneliti ingin mengidentifikasi realitas penundaan pernikahan khususnya pada wanita karir di DKI Jakarta lewat masing

masing pengalaman individu yang difers di lingkungan kehidupan sosialnya masing masing.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Oleh karena fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah peneliti menjadi tertarik memfokuskan penelitian pada bagaimana konstruksi sosial yang dibentuk mengenai penundaan pernikahan pada kalangan wanita karir di Indonesia secara khusus di perkotaan, dimana di perkotaan sendiri kita dapat melihat makin banyak wanita zaman sekarang yang mengutamakan karir jika dibandingkan dengan melangsungkan pernikahan.

1. Bagaimana wanita karir di DKI Jakarta mengkonstruksi penundaan pernikahan?
2. Bagaimana dampak kontruksi sosial yang terbentuk pada kehidupan sosial wanita karir di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini hasil yang akan dicapai adalah peneliti dan pembaca dapat mendefinisikan konstruksi sosial mengenai penundaan pernikahan di kalangan wanita karir.

1. Mengidentifikasi konstruksi sosial yang dibentuk wanita karir di DKI Jakarta mengenai penundaan pernikahan.
2. Mengidentifikasi dampak konstruksi sosial yang terbentuk pada kehidupan sosial wanita karir di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui konstruksi sosial mengenai penundaan pernikahan di kalangan wanita karir di DKI Jakarta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai

konstruksi sosial mengenai penundaan pernikahan di kalangan wanita karir di DKI Jakarta. Wawasan ini khususnya dalam bidang sosiologis. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian yang selanjutnya yang akan mengembangkan topik yang berkaitan dengan konstruksi sosial mengenai penundaan pernikahan di kalangan wanita karir di DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai realitas yang terjadi pada kalangan wanita karir di DKI Jakarta mengenai konstruksi penundaan pernikahan. Hal ini agar masyarakat dapat lebih menerima dan memahami pilihan mereka.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan beberapa acuan terkait meliputi teori utama, studi terdahulu serta beberapa konsep teori yang akan dikemukakan lebih jelas pada pembahasan dibawah ini.

1.5.1 Studi Terdahulu

Dalam menentukan fokus penelitian peneliti mendapatkan arah dari studi studi terdahulu yang tersedia di berbagai jurnal dengan beberapa aspek yang berbeda. Dari beberapa studi terdahulu yang telah dibaca dan dipahami oleh peneliti, berikut adalah beberapa studi terdahulu yang utama mengarahkan peneliti sehingga mendapat beberapa pertanyaan penelitian yang relevan.

Pada penelitian mengenai melajang sebagai identitas diri wanita yang tidak pernah menikah di Inggris menunjukkan penemuan sebagai berikut. Penelitian pada wanita yang tidak pernah menikah (umur 39-71) yang mengidentifikasi status lajang sebagai identitas diri mereka mengalami banyak rintangan secara sosial. Dari stigma yang diberikan hingga mempertanyakan keputusannya sebagai seorang lajang seringkali didapati dalam kehidupannya sehari hari. Walaupun secara analitis melajang bukan

merupakan pilihan yang umum, hal ini mereka jalani atas pengalamannya dan pertimbangan tertentu yang mempengaruhi keputusan akhir mereka mengenai pernikahan. (Simpson, 2015)

Pada penelitian profil masyarakat yang melajang di Asia menemukan bahwa masyarakat melajang di Asia sangat beragam, dipengaruhi oleh kultur yang dianut di masing masing negara. Pengaruh budaya luar dalam kehidupan sosialnya sehari-hari juga turut andil dalam dampak keputusan masyarakat yang memilih untuk melajang. Negara asia yang telah menerima dengan baik pengaruh budaya barat khususnya memudahkan masyarakat yang memilih lajang dalam kehidupan sosialnya sehari hari dan sebaliknya. Pandangan masyarakat tradisional mengenai keputusan ini pula tercermin pada aksi yang dilakukan dalam rangka menentang keputusan ini. Meskipun demikian proporsi orang yang memilih lajang di negara Asia masih terbilang sedikit walaupun dapat dilihat kenaikan setiap tahunnya. Bagaimanapun melihat angka orang orang yang memilih melajang di Asia yang kian bertambah, walaupun masih dapat terbilang belum seberapa dibanding di negara Barat, peningkatan yang relevan sangat dibutuhkan untuk menjaga hak hak mereka dan mempersiapkan masyarakat yang tidak menghakimi pilihan mereka. (Karel Karsten Himawan, Matthew Bambling, Sira Edirippulige, 2018).

Profil masyarakat lajang di Asia ini juga didukung oleh penelitian penelitian lain yang secara khusus membahas kategori masyarakat yang memilih melajang serta beberapa aspek yang menyertainya. Seperti pada negara Jepang dan Cina. Di jepang sendiri muncul tren penundaan pernikahan baik pada kelompok pria maupun wanita, lebih jauh pada penelitian tersebut mengemukakan hasil walaupun mayoritas pria dan wanita yang belum menikah memiliki keinginan untuk menikah, kurang dari sebagian responden menikah (dilihat pada gelombang ke-9 Japanese Life Corse Panel Survey). Diantara mereka yang tetap belum menikah, secara kasar dua pertiga atau dari mereka dapat diklasifikasikan dalam bergerak ke arah keputusan untuk melajang, sekitar 30% sebagai mereka yang gagal mewujudkan keinginan untuk menikah dan tidak lebih dari

5% sebagai menolak untuk menikah. (2021 James M. Raymo, Fumiya Uchikoshi & Shohei Yoda).

Penelitian demografi di asia timur mengenai peningkatan masyarakat yang melajang menunjukkan bahwa akan adanya proyeksi penigkatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi di tahun 2010. Hal ini didorong oleh perubahan pemaknaan pernikahan yang kian disesuaikan oleh norma yang berlaku. Peningkatan yang signifikan telah terjadi di Taiwan dan Korea Selatan, dimana norma pernikahan melemah. (Albert Esteve, 2020)

Sementara itu penelitian yang dilakukan di China, tren penundaan pernikahan dan melajang muncul pula tetapi masih dibarengi dengan pengaruh norma gender yang berlaku pada masyarakatnya, perubahan struktur (dalam keluarga dan pekerjaan) yang terjadi dijelaskan sebagai sesuatu yang progresif seiring berkembangnya zaman, tetapi ideologi gender tradisional tetap tidak berubah dikarenakan dikotomi tersebut berkaitan erat dengan dikotomi laki laki dan perempuan. Menjadikan perempuan menerima ekspektasi sosial yang ganda, disamping pengembangan diri mereka dalam pekerjaan juga harus diiringi dengan tetap menjaga tanggung jawab feminitas nya dalam keluarga. Namun demikian walaupun perempuan dihadapkan pada peran ganda secara sadar, jika mereka diharuskan memilih antara menjadi laki laki atau perempuan mereka tetap akan lebih memilih menjadi perempuan dengan pertimbangan lebih sedikit tanggung jawab ekonomi yang dibebankan dan anggapan bahwa pekerjaan domestik sudah seharusnya mendapat penghargaan yang kurang. Pada perempuan lajang juga ditemukan bahwa mereka lebih mementingkan aspek emosional daripada aspek ekonomi dalam pemilihan pasangannya, dan dalam pemilihan pasangannya perempuan lajang menerapkan standar yang tinggi dan sesuai dengan nilai yang mereka anut. Dibandingkan dengan julukan “leftover women” yang disematkan pada mereka, mereka lebih tepat dikatakan dengan perempuan yang melajang atas pilihannya sendiri.(Tianhan Gui, 2020).

Penelitian yang dilakukan di Korea Selatan menunjukkan makna aktivitas karir bagi dan pengembangan karir para wanita. Karir dan kesempatan dalam pengembangan

berkarir dimaknai oleh wanita sebagai cara menjaga keseimbangan dengan ekspektasi budaya, salah satunya adalah mengenai pernikahan. Lewat pengalaman yang beragam wanita dengan pengembangan karir hal ini yang kemudian mengubah prioritas mereka dalam keputusan baik berkarir maupun dalam praktik nilai-nilai budayanya sehari-hari. (Kim Namhee, 2019)

Penelitian yang dilakukan di Vietnam mengenai identitas gender dalam pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan masih dianggap penting bagi mereka, khususnya wanita. Pernikahan bukan hanya sebagai status namun juga sebagai prestasi dan investasi ekonomi (melalui anak yang dimiliki dalam pernikahan) untuk usia tua mereka nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam masih berpegang pada peran gender tradisional yang menunjukkan perbedaan peran yang jelas antara pria dan wanita dalam pernikahan. (Hien Thi Nguyen, 2019)

Melihat tren masyarakat melajang di negara-negara Asia, peneliti juga merasa perlu merujuk beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia. Berkaitan dengan masyarakat yang melajang peneliti menemukan rujukan studi yang umumnya berhubungan dengan generasi milenial, globalisasi dan modernisasi yang mengaitkan pada keputusan melajang itu sendiri. Beberapa pergeseran pola pernikahan terjadi pada generasi muda ditunjukkan pada penelitian yang menemukan relevansi perubahan sosial terhadap pergeseran pola pernikahan dalam konteks transisi kepemudaan global dan munculnya tren penundaan pernikahan pada generasi muda, dimana pada hasil studinya ditemukan faktor-faktor transisi kepemudaan yang mengakibatkan pergeseran pola pernikahan tersebut meliputi faktor politik hingga faktor ekonomi (Ariane Utomo, Oki Rahadianto Sutopo, 2020).

Tantangan budaya masyarakat Indonesia dalam wacana keputusan penundaan pernikahan ini dapat ditunjukkan pada penelitian yang mengemukakan pernikahan masih dianggap sebagai momen penting transisi pemuda menuju fase kedewasaan. Dalam perkembangannya, pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan sosial di masyarakat telah mendorong pergeseran makna dan tradisi dalam proses menuju pernikahan dari generasi ke generasi. Walaupun demikian kebebasan pilihan

untuk melakukan pernikahan dan proses dalam pernikahan secara sadar maupun tidak sadar masih dipengaruhi nilai normative kebudayaan yang dianut di masyarakat pada studi ini fokus pada masyarakat Yogyakarta. Peningkatan partisipasi pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut nyatanya masih belum menjamin kesadaran perempuan terhadap pengambilan keputusan diluar pilihan pilihan feminitas tradisional. Untuk melengkapi studi studi terdahulu yang telah disebutkan secara spesifik penelitian ini diharap dapat berkontribusi menemukan dan mendefinisikan lebih banyak subjek perempuan secara khusus perempuan perkotaan yang mendefinisikan dirinya sebagai wanita karir mengenai konstruksi sosial mereka mengenai penundaan pernikahan. (Rani Dwi Putri, P. R. (9(2), 2020).

Pada penelitian ditemukan wanita yang berpendidikan tinggi masih tetap mengalami diskriminasi, stereotip, dan ketidaksetaraan gender di lingkungannya. Karena pendidikan bukan salah satu yang membuat wanita dianggap sebagai “istri yang baik”. Penilaian ini dilihat dari ukuran kebahagiaan wanita yang pada masyarakat Indonesia diukur dengan masuknya wanita ke dalam institusi pernikahan, karenanya wanita dianggap “sukses” apabila sudah berkeluarga, memiliki anak dan sebagainya. Hal ini pula yang menyebabkan ekspektasi pernikahan bagi wanita menjadi tinggi. Setidaknya mereka mengalami dorongan ekstrim untuk menikah sampai pada usia 40an. (Retnaningsih, 2013)

Masih berkaitan dengan wanita dan pendidikan, penelitian yang dilakukan mengenai tren jarak usia dan pendidikan diantara pasangan menikah di Indonesia khususnya di perkotaan menunjukkan bahwa adanya pengaruh pendidikan dengan pernikahan. Hal ini dilihat dari semakin tingginya pendidikan seorang wanita juga semakin tinggi pula usia pertama mereka menikah, yang pula meningkatnya jarak usia antara istri dan suami saat menikah. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana wanita dapat memilih sesuai kriteria yang dimilikinya ditengah tekanan budaya untuk wanita segera menikah pada usia tertentu. (Utomo, 2014)

Menemukan bahwa adanya hubungan pendidikan dan keputusan melajang. Dimana individu umur 40-65 yang memiliki pendidikan terakhir dibawah SMA memiliki

kemungkinan menikah lebih rendah, sementara individu yang memiliki pendidikan terakhir di atas SMA cenderung tidak menikah atau tetap melajang. Hal ini berkaitan dengan pemilihan pasangan dengan nilai yang sesuai dan setara atau lebih baik dari individu tersebut. (Diahhadi Setyonaluri, 2020)

Jika kita melihat fenomena pernikahan dini dimana sebagai contoh ekstrim bagaimana perempuan menjadi subjek yang didorong masuk pada institusi pernikahan dilihat dari nilai dan budaya yang dianut pada suatu masyarakat. Dalam fenomena pernikahan dini remaja perempuan berusia kurang dari 20 tahun terpaksa masuk ke dalam institusi pernikahan karena berbagai faktor diantaranya sebagai bentuk kepatuhan pada orang tua, nilai adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi (pelunasan hutang), faktor pendidikan yang kurang mumpuni, dan faktor dalam diri individu. Tentunya pernikahan dini berdampak pada kehidupan sosial individu karena pernikahan terjadi saat usia individu belum matang dan kurangnya wawasan akan pernikahan. (Rima Hardianti, 2020)

Penelitian mengenai pemaknaan wanita lajang usia dewasa (27-30) yang dilakukan di Kota Makassar menunjukkan bahwa tidak semua wanita lajang dewasa memaknai pernikahan sesuatu yang positif. Bagi mereka yang memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang positif, pernikahan merupakan hal yang penting yang dianggap sakral dan idealnya sekali seumur hidup. Karena hal ini dalam melangsungkan pernikahan mereka menganggap tidak perlu terburu-buru, karena banyak hal yang harus dipenuhi demi memenuhi pernikahan yang mereka idamkan. Di sisi lain wanita yang memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang negatif berkaitan dengan faktor ketakutan akan pernikahan seperti takut terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, salah dalam pemilihan pasangan, ketidakstabilan finansial, ketidaksetiaan, dan hal-hal yang kemudian membuat wanita ini cenderung mengalami pergeseran pola pikir dalam memaknai pernikahan (Andu, 2019)

Pada penelitian mengenai persepsi pernikahan bagi wanita dewasa awal (29-31) yang memiliki latar belakang orang tua yang bercerai dikemukakan bahwa persepsi wanita terhadap pernikahan mengalami perubahan karena trauma orang tuanya yang

bercerai baik pada wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Wanita yang belum menikah memiliki lebih banyak aspek untuk dipertimbangkan untuk masuk dalam institusi pernikahan yang cenderung menunjukkan keengganan mereka untuk menikah di kemudian hari. Sementara itu bagi wanita yang sudah menikah, pernikahan justru dijadikan sebuah wadah perbaikan akan pengalamannya dalam keluarga yang terjadi di masa lalu. (Milalia Rizqi Aulia, 2021)

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann merupakan teori sosiologi kontemporer hasil dari memproses teori teori sosiologi sebelumnya yang menjadi akar teori ini. Berger seperti halnya Garfinkel mempelajari akar teorinya dari guru besarnya yaitu Alfred Schutz, dimana dalam prosesnya membuat Berger mampu mengembangkan model teoritis mengenai pembentukan realitas dunia sosial terbentuk. Pada bukunya *The Social Construction of Reality* (1966) Berger bersama dengan Luckman mengemukakan pemahaman mengenai terbentuknya realitas sosial. Berger dan Luckman (1966:1) menjelaskan teori mereka dengan menjelaskan “realitas terbentuk secara sosial” dan sosiologi ilmu pengetahuan harus menganalisa proses bagaimana hal itu terjadi. Mereka mengakui realitas “obyektif” dengan membatasi realitas sebagai “kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita”. Menurut Berger dan Luckman, kita semua mencari pengetahuan atau “kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik yang khusus”. Dengan demikian pemahaman bahwa realitas memiliki kegandaan (obyektif dan subyektif) dalam kehidupan sehari-hari dikemukakan pula oleh Berger melalui penegasan dimensi realitas yang diciptakan oleh manusia, sebagaimana manusia merupakan instrument dalam penciptaan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi dan mempengaruhi dirinya melalui proses internalisasi.

Selanjutnya penjelasan Berger mengenai pembentukan realitas sosial dijelaskan melalui posisi masyarakat yang dapat menjadi realitas obyektif serta subyektif. Masyarakat sebagai realitas obyektif dihubungkan dengan lembaga lembaga sosial yang sudah ada dan berada pada kesatuan struktur, dalam hubungan ini kemudian masyarakat mengalami internalisasi, eksternalisasi dan obyektivasi yang terus menerus terjadi secara dialektis :

- Eksternalisasi merupakan proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk dunia manusia. Eksternalisasi merupakan proses atau ekspresi diri dari manusia di dalam membangun tatanan kehidupan, atau biasa disimpulkan sebagai proses penyesuaian diri manusia dalam lingkungannya. Sebagai konstruksi social budaya, gender terbentuk dari pengalaman sejarah manusia yang diinterpretasikan dan dimaknai berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.
- Obyektivasi merupakan proses dimana interaksi social dalam dunia intrasubjektif yang dikembangkan atau mengalami institusionalisasi.
- Internalisasi merupakan proses dimana individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga social atau organisasi social tempat individu menjadi anggotanya.

Berger menambahkan bahwa sebenarnya model ini tidak sama dengan apa yang dikemukakan oleh kaum fungsionalis, karena sebenarnya masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir tetapi sebagai proses yang sedang terbentuk, dengan demikian obyektivitas merancang suatu proses dimana dunia sosial akan menjadi suatu realitas yang mampu menghambat dan juga membentuk partisipannya. Di sisi lain masyarakat sebagai realitas subyektif dijelaskan oleh Berger sebagai fokus internalisasi masyarakat pada masa awal di mana saat ia diperkenalkan pada dunia sosial obyektif, Berger kemudian menarik batasan realitas obyektif yaitu orang lain yang cukup berpengaruh pada awal sosialisai individu. Seiring dengan

perkembangannya individu tidak dapat meninternalisir realitas secara utuh di mana pada saat inilah individu mulai melakukan kegiatan menafsir terhadap realitas yang terjadi. Setiap orang memiliki versi realitas yang dianggapnya sebagai cermin dari dunia obyektif. Dengan demikian Berger dan Luckmann menekankan pada eksistensi realitas sosial yang berganda.

Perumusan Berger mengenai hubungan timbal balik diantara realitas social yang bersifat objektif dengan pengetahuan yang bersifat subjektif dilandaskan pada tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- **Realitas kehidupan sehari hari**

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa Berger memahami realitas social sebagai sesuatu yang kehadirannya tidak bergantung pada kehendak individu masing-masing. Berger juga mengakui bahwa realitas memiliki banyak macamnya. Namun, dalam karyanya bersama Luckmann, dikemukakan bahwa apa yang paling penting bagi analisis sosiologis adalah realitas yang dihadapi atau dialami oleh individu di kehidupan sehari hari.

- **Interaksi social dalam kehidupan sehari hari**

Menurut Berger dan Luckmann, realitas social dialami oleh individu bersama-sama dengan individu lainnya. Individu lain sesungguhnya juga merupakan realitas social. Dalam pengertiannya , orang lain bukan hanya sebagai bahan atau objek dalam realitas kehidupan sehari-hari individu, tetapi mereka juga bisa dilihat sebagai realitas itu sendiri. Artinya, pengalaman individu tentang sesamanya merupakan aspek penting untuk ditelaah dari konstruksi realitas dalam diri seseorang.

- **Bahasa dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari**

Ekspresi manusia dapat menjadi sesuatu yang baku dan objektif, menjadi cara bagi suatu kelompok social untuk berekspresi. Ia menjadi gerak isyarat yang tersedia baik bagi si pencetus. Ekspresi-ekspresi objektif berasal dari

sesuatu yang subjektif, dari seorang pencetus. Dengan mengalami proses pemantapan social, suatu ekspresi menjadi tersedia melampaui batas-batas situasi tatap muka sewaktu ia dicetuskan untuk pertama kali. Ringkasnya, realitas kehidupan sehari-hari tidak bertahan tanpa adanya objek. Bagian terpenting data objek-objek bukan bentuknya fisik, tetapi makna subjektif yang ditampilkan dalam interaksi seseorang atau kelompok manusia atau sekelompok manusia kepada manusia lain.

1.5.2.2 Feminisme

Dalam kehidupan bermasyarakat kita mengenal konsep gender dimana gender adalah sistem praktik sosial yang dilembagakan untuk menjadikan orang sebagai dua kategori yang sangat berbeda, laki-laki dan perempuan, dan mengatur hubungan sosial ketidaksetaraan atas dasar perbedaan itu (Ferree, Lorber, and Hess 1999; Lorber 1994; Nakano Glenn 1999; Ridgeway 1997; Ridgeway and Smith-Lovin 1999; Risman 1998). Konsep gender muncul akibat konstruksi masyarakat tertentu yang memungkinkan melakukan pembenaran pada generalisasi konstruksi yang terbentuk. Terbentuknya konstruksi gender yang demikian salah satunya berakar pada kepercayaan budaya yang dianut pada masyarakat tertentu, secara umum kembali pada pernyataan awal bahwa gender merepresentasikan diri mereka sebagai penggambaran universal perempuan dan laki-laki yang didefinisikan oleh serangkaian karakteristik yang sempit. Dalam mendefinisikan lewat serangkaian karakteristik yang sempit ini muncul beberapa pernyataan seperti laki laki dipandang sebagai status yang lebih layak dan kompeten secara keseluruhan dan lebih kompeten dalam hal-hal yang "paling diperhitungkan" (misalnya, rasionalitas instrumental). Perempuan dipandang kurang kompeten secara umum tetapi "lebih baik" dalam tugas-tugas komunal meskipun tugas-tugas itu sendiri kurang dihargai (Conway, Pizzamiglio, and Mount 1996; Fiske et al. 2002). Sementara itu muncul mitos dan bias gender yang lain seperti, pada laki laki yang dikatakan sebagaimana dianggap sewajarnya dalam masyarakat memiliki peran sebagai pahlawan,

pelindung, pemimpin, menjadi standar di masyarakat, dan digambarkan utuh sebagai manusia (pengaruh sudut pandang agama). Sementara pada perempuan yang dikatakan sebagaimana dianggap sewajarnya dalam masyarakat memiliki peran sebagai pendukung, pelayan, harus menjalankan fungsi reproduksinya dalam perkawinan, memiliki sifat yang tidak rasional dan tidak mampu memimpin, harus berpenampilan menarik atau menjaga penampilannya, dan merupakan bagian dari laki laki (pengaruh sudut pandang agama). Peran peran yang dikemukakan tersebut akhirnya dinormalisasi pada kasus tertentu sebagai pembentuk hubungan sosial yang ada di masyarakat, entah dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan atau lingkungan masyarakat secara umum. Ini membuktikan bahwa keyakinan masyarakat yang berakar kuat tentang perbedaan intrinsik laki-laki dan perempuan terus memilah realitas konkret yang berurusan dengan laki-laki dan perempuan yang sebenarnya ke dalam kategori yang lebih kecil dan abstrak. Di sisi lain muncul kepercayaan alternatif terhadap konsep gender tradisional secara budaya yang telah dijelaskan di awal, dimana pada sistem ini muncul berbarengan dengan kepercayaan hegemoni yang ada di masyarakat sekarang. Seperti peran peran perempuan modern yang ditampilkan dengan image lebih kuat, yang pada akhirnya mengurangi diferensiasi antara laki laki dan perempuan. Tetapi dengan munculnya kepercayaan alternatif ini belum menghilangkan kepercayaan dalam budaya terhadap konsep gender itu sendiri karena sebelumnya konsep tersebut sudah terlanjur menjadi realitas konstruksi masyarakat yang kuat dan harus dihadapi. Kepercayaan konsep gender dalam budaya masyarakat sendiri yang divalidasi kembali lewat norma gender yang ada di masyarakat, walaupun norma gender ini berlaku lebih sempit dengan hanya mencakup secara umum pada wilayah wilayah tertentu (norma gender lokal). Norma gender sendiri dijelaskan yang membentuk pola perilaku individu, dicontohkan pada realisasi konstruksi peran gender pada lingkungan tertentu. Norma gender berkaitan dengan serangkaian ekspektasi yang membedakan perilaku antara perempuan dan laki-laki (Pearse dan Connell 2016). Keyakinan yang tersebar luas bahwa perempuan adalah

pengasuh yang lebih baik daripada laki-laki, misalnya, merupakan norma yang kuat yang mengakibatkan perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberikan pengasuhan anak dan representasi mereka yang tidak proporsional dalam pekerjaan pengasuhan (Ridgeway 2011). Penting untuk dicatat bahwa norma adalah kualitas kebersamaan dan bukan deterministik perilaku individu. Sementara, secara agregat, sikap dan perilaku selaras dengan norma, individu mengekspresikan agensi dalam bereaksi terhadap dan seringkali menantang batasan budaya ini (Kabeer 2002; Risman 2004).

Dalam kaitannya dengan gender feminisme muncul bukan hanya sebagai ideologi namun juga sebagai gerakan dalam upaya perempuan memperjuangkan hak nya dalam masyarakat. Lebih jauh feminisme berusaha melakukan pembongkaran sistem patriarki, mencari akar atau penyebab ketertindasan perempuan serta mencari pembebasannya. Dengan kata lain feminisme adalah teori untuk pembebasan wanita. Gerakan feminis awal seperti yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan dengan maksud menghadapi patriarki, mengenai posisi perempuan yang subordinat dan memiliki sikap yang emosional. Selanjutnya feminisme sendiri dan perkembangannya dalam perjuangannya membagi dirinya dalam tiga gelombang besar (Gamble, 2006). Adapun feminisme pada gerakan awalnya masih terbelah homogen dalam fokus perjuangannya dan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan universal. Namun hal ini merupakan langkah awal dalam membahas keberlanjutan isu yang ada terkait perempuan sebagai kerangka berpikir awal yang universal. Gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Wollstonecraft *The Vindication of the Rights of Woman* (1792) hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad kedupuluh. Tulisan Wollstonecraft sebagai tonggak gerakan feminisme modern Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan Wollstonecraft akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang

mandiri, terutama secara finansial (Richardson, 2002). Perjuangan Wollstonecraft dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill. Mereka memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. (Suwastini, 2013). Isu yang menjadi pokok perjuangan feminis gelombang pertama ialah tuntutan hak pilih, pendidikan, serta lapangan pekerjaan bagi perempuan, hingga pada akhirnya tercapainya hak pilih untuk perempuan. Meskipun demikian, feminis gelombang pertama dapat terbilang masih berhati-hati dalam kevakalannya membahas isu perempuan karena dinilai keluar dari nilai konvensional masyarakat sendiri. Lebih jauh kritik yang disampaikan pada feminis gelombang pertama ialah masih bersifat eksklusif dan masih mengandalkan kaum laki-laki dalam mencapai tujuan mereka. Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960an yang ditandai dengan terbitnya *The Feminine Mystique* (Freidan, 1963), diikuti dengan berdirinya *National Organization for Woman (NOW)* (1966) dan munculnya kelompok-kelompok *conscious raising (CR)* pada akhir tahun 1960an. Feminisme gelombang kedua dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka. Feminisme gelombang kedua bertema besar “women’s liberation” yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung: reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas. Kritik yang diterima oleh feminis gelombang kedua adalah belum mencakupnya gerakan bersama dengan perempuan kulit warna, lesbian dan perempuan bekerja yang kemudian memiliki gerakan sendiri yang radikal. Jika menghimpun kritik dari feminis gelombang pertama dan kedua, yang kita dapat adalah fakta bahwa gerakan feminis masih bersifat rasis dan etnosentris yang hanya mewakili perempuan kulit putih kelas menengah dan memarginalkan perempuan

dari kelompok etnis dan kelas lainnya. Oleh karena itu beberapa ahli mendefinisikan feminis gelombang ketiga atau postfeminist sebagai gerakan kolektif yang individualis, hal ini ditandai dengan tercapainya tujuan feminis gelombang ke-dua sehingga menyebabkan kehilangan arah pada gelombang ketiga atau postfeminisme. Tujuan tujuan baru yang ditemukan bergerak dalam kelompok kelompok kecil yang mendasarkan perjuangannya pada pengalaman individual dan kelompok.

Selanjutnya kembali pada ranah bahasan teori diferensiasi permasalahan perempuan dapat dijelaskan melalui empat bagan teori feminisme yang meliputi perbedaan gender, ketidaksetaraan gender, penindasan gender, serta penindasan gender secara structural. Hal ini kemudian lebih lanjut dijelaskan dengan aliran pemikiran masing masing yang membahas tiap fokus dengan teori yang berbeda namun masih dalam lingkup kajian teori feminisme. Perbedaan gender didefinisikan sebagai pengalaman perempuan, dimana jika dibandingkan dengan pengalaman laki laki perempuan memiliki tempat berbeda di dalam masyarakat, analisis pada bahasan ini kemudian relevan dibahas dalam teori feminisme kultural dan teori perbedaan seksual. Teori feminisme kultural menjelaskan bahwa kebudayaan yang menentukan, dengan kata lain sistem kebudayaan pada masyarakat tertentu sama dengan system social, dimana perempuan selalu dianggap sebagai subjek inferior dalam masyarakat, hal tersebut yang menyebabkan perempuan tersubordinasi oleh laki-laki di dalam masyarakat. Ketidaksetaraan gender didefinisikan sebagai tempat atau lokasi kaum perempuan dalam sebagai besar situasi atau peristiwa bukan hanya berbeda tetapi juga tidak setara dengan laki laki, analisis pada bahasan ini kemudian relevan dibahas dalam teori feminisme liberal. Teori feminisme liberal sendiri menjelaskan bahwa perempuan dapat mengklaim kesetaraan dengan laki-laki berdasarkan kecakapan bernalar, relevan pada bahasan perempuan dalam Pendidikan, ruang public. Penindasan perempuan didefinisikan sebagai perempuan berada dalam keadaan tertindas, berarti pula perempuan bukan hanya berbeda, tetapi secara aktif perempuan dikendalikan, disubordinasi, dimanfaatkan dan

bahkan disiksa oleh laki-laki, bahasan ini dibahas secara relevan dengan teori feminisme psikoanalisis dan radikal. Teori feminisme psikoanalisis menjelaskan bahwa semua dorongan bersumber dari seks, dengan kata lain teori ini lebih menekankan pengaruh pada dinamika emosional dan kepribadian. Di sisi lain, teori feminisme radikal menjelaskan dua kepercayaan sentral yakni perempuan mempunyai nilai positif absolut sebagai perempuan, serta perempuan ditindas dari segala tempat oleh sistem patriarki. Penindasan perempuan secara struktural didefinisikan sebagai pengalaman perempuan atas perbedaan, ketidaksetaraan, dan penindasan berbeda pada setiap lokasi sosialnya dalam sistem kapitalisme, patriarki dan rasisme, dalam analisis bahasan ini dapat menggunakan teori feminisme sosialis dimana teori ini banyak mengambil konsep Marx terkait bahasannya mengenai kapitalisme.

1.5.2.3 Feminisme Liberal

Lahirnya feminisme liberal pada abad ke-18 dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft dalam tulisannya mengenai hak perempuan kemudian berlanjut pada abad-abad selanjutnya pembahasan lebih kompleks mengenai hak perempuan dilakukan dalam nuansa liberalism oleh John Stuart Mill, Harriet Taylor Mills, dan Betty Friedan. Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa feminisme liberal mengenai ketidaksetaraan gender dalam Ritzer (Ritzer, 2012) ialah bahwa wanita dapat mengklaim kesetaraan dengan pria berdasarkan suatu kecakapan manusia yang hakiki untuk menjadi agensi moral yang bernalar, bahwa ketidaksetaraan gender adalah hasil dari pemolaan berdasarkan seks pembagian kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dihasilkan dengan mengubah pembagian kerja melalui pemolaan kembali lembaga lembaga kunci -hukum, kerja, keluarga, dan media. Dengan demikian feminisme liberal bersandar pada kepercayaan bahwa semua manusia memiliki ciri-ciri esensial tertentu termasuk ialah kemampuan bernalar, agensi moral serta aktualisasi diri, pelaksanaan kemampuan-kemampuan itu melalui pengakuan hukum atas hak-hak universal, ketidaksamaan-ketidaksamaan

di antara pria dan wanita yang diberikan oleh jenis kelamin adalah kumpulan konstruksi sosial yang tidak mempunyai landasan di dalam “alam”, serta perubahan sosial untuk kesetaraan dapat dihasilkan oleh suatu seruan terorganisir kepada publik yang dapat berpikir dan dengan memanfaatkan negara.

Betty Friedan (1963) menunjukkan ketidakbebasan perempuan bermula pada para perempuan tahun 1950an-1960an. Dimana pada masa itulah para perempuan merasa gelisah, merasa ada sesuatu masalah terhadap dirinya yang mereka sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya masalah itu. Friedan menyebutnya sebagai Untuk keluar dari kegelisahan tersebut para perempuan itulah semakin berusaha untuk menjadi feminim sehingga mereka tidak menjadi berbeda dengan perempuan lainnya yang dianggap . Dengan pemenuhan feminitas bagi para perempuan inilah Friedan menyebutnya sebagai Mistik Feminim. Friedan menyebutkan (1963:28) *The feminine mystique says that the highest value and the only commitment for women is the fulfillment of their own femininity.* Pemenuhan feminitas yang dilakukan para perempuan ini justru membuat mereka menjadi pasif dan didominasi oleh laki-laki (Friedan, 1963:28). Ketika mereka tidak memenuhi peran feminimnya masyarakat, dalam mistik feminim maka mereka akan dianggap mengalami ‘Woman’s Role Crisis’ karena mereka tidak mampu memenuhi feminitasnya. Masyarakat memaksa para perempuan untuk mengambil peran yang akan membuat mereka memenuhi feminitasnya. Dengan begitu sebenarnya ‘hak’ perempuan diambil dari dirinya sendiri. Karena pemenuhan feminitas dianggap sebagai ‘kebaikan’ yang ‘taken for granted’ yang perlu diperankan di masyarakat. Dengan tidak terpenuhinya ‘hak’ inilah, para perempuan menjadi tidak memperoleh kesempatan mengembangkan kapasitas nalar mereka. Betty Friedan (1963:284) menunjukkan bahwa ‘A woman must say ‘no’ to feminine mystique very clearly indeed to sustain discipline and effort that any professional commitment requires’. Maka dengan para perempuan menolak mistik feminim yang membuat para perempuan berperan untuk memenuhi feminitasnya inilah maka perempuan akan mendapatkan kebebasan mereka.

Dalam praktiknya di masyarakat kajian feminisme liberal dilakukan salah satunya oleh Risman (2004:437) untuk mendefinisikan gender sebagai suatu struktur yang sangat rumit yang memolakan perilaku manusia pada level individu, kultural/interaksional, serta institusional. Kemudian mendapat kesimpulan bahwa gender ialah suatu system stratifikasi yang dikonstruksikan secara social dimana jika dilihat dari sisi feminism liberal, system stratifikasi inilah yang menghasilkan pembagian kerja bergender, suatu pengorganisasian masyarakat ke dalam lingkup publik dan privat dan suatu dimensi kultural dari ideologi seksis. Pembagian kerja secara seksual di masyarakat ditandai sebagai “public” dan “privat”. Wanita diberi tanggung jawab terutama di lingkungan privat sementara pria memiliki akses yang lebih pada lingkungan publik dengan sebagian besar berkaitan dengan uang, kebebasan, status, kesempatan-kesempatan untuk pertumbuhan dan percaya diri. Kedua ranah ini kemudian saling berinteraksi dan membentuk rintangan rintangan baru untuk perempuan pastinya untuk diterima di lingkungan publik tanpa melepas tanggung jawab di lingkungan privatnya. Hubungan seksisme wanita dengan kegiatan lingkungan privat yakni pengasuhan, manajemen emosi, dan pemeliharaan rutin berarto bahwa wanita diharapkan melakukan pekerjaan tambahan itu di dalam lingkungan publik, yang sering terbawa ke dalam pekerjaan-pekerjaan bergaji rendah ketika keahlian-keahlian “wanita” yang demikian dikomodifikasikan dan dipasarkan (Adkins,1995;Pierce, 1995).

Terakhir apa apa yang ideal menurut feminisme liberal ialah memperjuangkan klaim hak hak perempuan menuju kesetaraan dengan memperjuangkan esensi perempuan menggunakan prinsip prinsip universal, dengan kata lain pandangan pada aspek aspek yang diperlukan saja pada ruang publik jika mengingat kembali akses lebih kaum pria sama seperti demikian. Susunan gender yang ideal bagi feminisme liberal adalah ketika tiap individu bertindak sebagai agen moral yang bebas dan bertanggung jawab yang memilih gaya hidup yang paling cocok baginya dan mempunyai pilihan yang diterima dan dihargai berkaitan dengan status dan karir. Hal ini merupakan sebuah praktik menuju kebebasan dan kesetaraan.

1.5.3 Konsep-Konsep Penelitian

1. Perkawinan dan Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Subordinasi pada perempuan tercipta karena wacana patriarki yang menumbuhkan klaim bahwa perempuan adalah subjek yang inferior, namun demikian hal ini mendapat argument yang berbalik yang ditemukan oleh para feminis gelombang pertama mengenai kebutuhan di ranah social dan politik khususnya akan sifat sifat yang dimiliki oleh perempuan dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan

2. Patriarki

Walby menjelaskan konsep patriarki sebagai sebuah sistem dari struktur sosial yang telah ada dimana selanjutnya dalam penggambaran pemahaman ketidaksetaraan gender konsep patriarki dijelaskan melalui enam struktur dasar yakni (Walby, 1989):

1. Patriarki ada dalam ranah pekerjaan di mana perempuan mengalami pemisahan secara horizontal maupun vertikal secara sistematis dalam sistem pengupahan kapitalisme
2. Patriarki ada dalam ranah pembagian kerja berdasarkan gender. Dimana hubungan ini dijelaskan dalam frame hubungan pernikahan antara suami dan

istri, dengan suami sebagai pemegang kendali pekerjaan istri (pekerjaan domestik).

3. Patriarki ada dalam instansi kebudayaan yang telah diinternalisasi sejak lama, sehingga perempuan seringkali berada pada posisi yang mengalami “kerugian budaya”
4. Hubungan heteroseksual, pada struktur satu ini Walby kemudian berargumen bahwa seksualitas memiliki penjelasan lain untuk kemudian diidentifikasi sebagai bentuk subordinasi terhadap perempuan. Hal ini yang kemudian tidak banyak dijelaskan hubungannya dengan pembahasan gender yang relevan dengan struktur dasar patriarki.
5. Patriarki melalui kekerasan laki laki terhadap perempuan. Dalam hal ini kekerasan yang dimaksud berbeda beda karena individu cenderung memiliki pengalaman yang berbeda.
6. Patriarki dipelihara dengan baik oleh negara. Hal hal seperti kesempatan pada akses umum atau public, kebijakan yang disusun oleh negara dianggap sebagai cerminan patriarki pada beberapa bagiannya.

Selanjutnya (Walby, 1989) juga mengemukakan dua bentuk utama patriarki serta bagaimana patriarki berevolusi dari ranah privat ke ranah yang lebih luas yakni ranah public. Patriarki dalam ranah privat dicirikan berada pada rumah, lingkungan paling kecil dimana praktek patriarki terinternalisasi. Sementara patriarki di ranah public dicirikan pada pembatasan akses bagi perempuan, dimana pada struktur trukturanya di masyarakat perempuan tetap menjadi pihak yang mengalami subordinasi. Evolusi yang terjadi sebagai bentuk perluasan praktek patriarki menitikberatkan pada pemanfaatan atau eksploitasi yang dilakukan terhadap perempuan secara kolektif dalam berbagai bidang. Walby juga menambahkan pada perkembangan selanjutnya transformasi patriarki modern memiliki ciri khasnya sendiri pada kelompok perempuan yang telah memiliki kesempatan lebih pada akses dibandingkan dengan sebelumnya. Namun demikian kelompok perempuan ini masih memiliki ciri keertindasan yaitu sebagai ibu

tunggal, atau sebagai perempuan lajang, atau justru masih bergantung sepenuhnya pada suaminya, dan lain-lain, yang kemudian membuatnya sulit untuk mencapai posisi yang adil dalam struktur kerja kapitalisme

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Paradigma dan Tipe Penelitian

Paradigma adalah cara pandang atau melihat sesuatu yang hidup dalam diri seseorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas sekitarnya. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian (Guba & Lincoln, 1988: 89-115).

Paradigma penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif digunakan karena mengingat fenomena yang akan diteliti oleh peneliti menggambarkan realitas ganda yang ada di masyarakat, oleh karena itu metode penelitian kualitatif dirasa lebih sesuai dengannya. Seperti yang telah dikatakan pula bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Adapun pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian yaitu pendekatan fenomenologi. Creswell (1998:51) fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep

atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri.

1.6.2 Setting Sosial Penelitian

Penelitian ini akan mengambil setting sosial yakni pada perkotaan, lebih spesifik Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk menjelaskan pengalaman beragam berbagai wanita karir yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan perkantoran di DKI Jakarta mengenai penundaan pernikahan berkaitan dengan posisi nya pada pekerjaan. Lebih lanjut DKI Jakarta dipilih sebagai setting sosial oleh peneliti karena sebagai pusat kota, di DKI Jakarta kita dapat melihat berbagai kemajuan pada kesempatan, akses serta gaya hidup yang menawarkan wanita pada pilihan pilihan yang dapat dipilihnya secara mandiri, sehingga memungkinkan ditemukannya berbagai keunikan dari pengalaman wanita karir dalam pemilihannya untuk menunda pernikahan.

1.6.3 Penentuan Informan Penelitian

Dalam pemilihan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik pemilihan secara snowball. Teknik snowball adalah teknik penentuan informan yang mula mula di awal jumlahnya kecil, kemudian semakin membesar (Sugiyono, 2009). Peneliti menggunakan teknik snowball karena pada awalnya peneliti hanya menemukan sebagian kecil informan, kemudian untuk melengkapi data peneliti mencari informan lain dengan meminta saran informan lain dari informan yang telah menjadi subyek penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki kriteria tak tertulis dalam mendapatkan informan atau subjek penelitian Kriteria yang ditetapkan, dapat memberikan kemudahan untuk peneliyi dalam mendapatkan informan yang sesuai dengan isu penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. 1 informan kunci yang memiliki pengetahuan dan lingkungan yang dekat dengan calon informan wanita karir di DKI Jakarta
2. 8 informan wanita karir di DKI Jakarta dengan pekerjaan yang berbeda beda, namun sudah memiliki pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun dan mengalami beberapa kali peningkatan jabatan.
3. 2 anggota keluarga informan

No.	Nama Informan
1.	DS
2.	SA
3.	RM
4.	NP
5.	MS
6.	MW
7.	LK
8.	IM
9.	DA
10.	NN
11.	AI

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto, 2002).

Dalam menunjang penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut :

1. Metode Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Metode Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

3. Metode Dokumentasi

Data juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian data melalui transkrip wawancara, hasil observasi, pemaknaan dokumen, serta studi literature dengan mengumpulkan materi-materi melalui berbagai sumber yang dimaksud. Materi tersebut kemudian dikaji dalam rangka meningkatkan pemahaman. Terdapat empat tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992). Dimulai dari

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara yang menghasilkan transkrip, hasil observasi, serta berbagai dokumen yang sesuai dengan kasus pada penelitian serta mampu menunjang penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasikan data menjadi suatu simpulan data sederhana yang terorganisasi.

3. Penyajian Data

Proses penyajian data merupakan suatu proses organisasi informasi dalam rangka menyimpulkan data riset. Penyajian data dilakukan sedemikian rupa agar proses penyimpulan penelitian dapat dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan

Sebagai suatu proses konfigurasi yang utuh, penarikan kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan semenjak proses penyusunan catatan, pola-pola, pernyataan, konfigurasi, sebab akibat, serta beragam proposisi dari temuan penelitian (Sinambela,2019)